Vol. 4, No. 3, September 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Pengarusutamaan Gender Di Kelurahan Klojen Melalui Pemberdayaan: Bincang Santai Mahasiswa HKn FIS Universitas Negeri Malang SDGs

Anggun Islami Putri[1], Attalah Rafif Widyadhana[2], Helena Putri Widyawati[3], Nurul Rizkiyah[4], Zidny Tsabita Fahmi[5], Sri Untari[6]
(1)(2)(3) Ppkn/Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang, 6515, Indonesia
Email : anggun.islami.2407116@students.um.ac.id , sri.untari.fis@um.ac.id

A B S T R A K

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Klojen. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perempuan yang berpartisipasi dalam pemerintahan, tokoh masyarakat, dan penyelenggara program kesehatan serta pemberdayaan. Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan. Indonesia masih memiliki tantangan yang perlu dihadapi dalam hal partisipasi ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta representasi politik perempuan. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Indonesia yang baru saja berganti, sebab jika dilihat dari data Global Gender Gap Report menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2024 masih ada di skor 68,6% dari rata-rata skor kesetaraan gender global yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 68,5%, angka tersebut terpantau 0,01% lebih tinggi dari rata-rata global. Jumlah kenaikan tersebut dapat dijadikan inditator bahwa angka kesadaran masyarakatnya akan kesetaraan gender masih minim.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Teori, Peran, Keadilan, Partisipasi Masyarakat

A B S T R A C T

Gender equality and justice is a condition where the portion and social cycle of women and men are equal, balanced and harmonious. Gender equality seeks how men and women have the opportunity to realize their rights and potential to contribute to political, economic, social, and cultural development, and can equally enjoy the results of that development The research method used was a qualitative approach with a case study in Klojen Village. Primary data was obtained through interviews with women participating in government, community leaders, and organizers of health and empowerment programs. Secondary data came from policy documents and previous research. Data analysis techniques were conducted thematically to identify patterns and factors that contribute to increasing women's participation. Indonesia still has challenges to face in terms of women's economic participation, health, education, and political representation. Of course, this is a big responsibility for the Indonesian government that has just changed, because if seen from the Global Gender Gap Report data, it shows that gender equality in Indonesia in 2024 is still at a score of 68.6% of the average global gender equality score set in 2024 which is 68.5%, this figure is observed to be 0.01% higher than the global average. The amount of increase can be used as an indicator that the number of people's awareness of gender equality is still minimal.

Keywords: *Gender Equality, Theory, Roles, Justice, Community Paticipation*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
03.06.2025	07.07.2025	25.08.2025	30.09.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dalam sektor pemerintahan merupakan aspek yang penting untuk menciptakan tata kelola publik yang adil, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Kesetaraan gender tidak hanya sekedar memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan akan tetapi berkontribusi dalam pengambilan keputusan, juga memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintahan mampu menjawab kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok berdasarkan gender. Kesetaraan gender dalam pemerintahan merupakan salah satu isu yang masih terus diperjuangkan guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan representatif. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukan hanya sekadar jumlah, tetapi juga tentang bagaimana suara dan perspektif mereka dapat memengaruhi kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat(Ul'zikri & Annisa, 2024). Di berbagai negara seperti islandia, swedia, norwegia, denmark, dan juga Indonesia, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari norma sosial, akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, hingga keterbatasan sumber daya yang mendukung partisipasi aktif mereka.

Kelurahan Klojen, Kota Malang, adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di pemerintahan lokal. Namun, meskipun terdapat kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, implementasi di tingkat kelurahan masih belum optimal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sering kali terbatas karena minimnya akses terhadap program-program yang mendukung pemberdayaan serta kurangnya sosialisasi mengenai peluang partisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan yang dapat menjadi penghalang utama bagi mereka untuk terlibat lebih aktif.

Untuk mengatasi masalah ini, program kesehatan dan pemberdayaan dapat menjadi solusi yang efektif(Ulzikri, 2020). Program kesehatan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan tetapi juga memastikan mereka memiliki kondisi yang baik untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, program pemberdayaan, seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan, dan dukungan ekonomi, dapat membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mengambil peran dalam pemerintahan di Kelurahan Klojen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana program kesehatan dan pemberdayaan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan lokal. Dengan mengidentifikasi hambatan utama serta merumuskan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender di Kelurahan Klojen. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dapat meningkat secara signifikan, memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

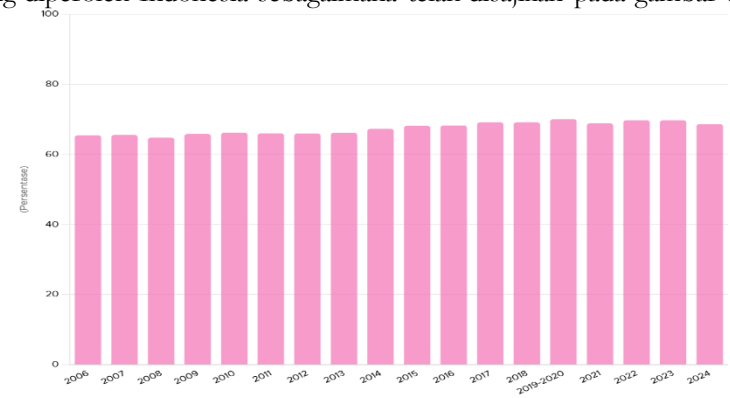
Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengam metode studi kasus Harapan kami dari metode ini adalah supaya dapat memperoleh suatu data yang asli, karena kami datang meyaksikan langsung yang terjadi pada lokasi, serta melewati berbagai prosedur panjang seperti mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan penalaran dan penyusunan terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan di dalam penelitian ini. Proses panjang tersebut relevan dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian. (Agustina dkk., 2023) Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan salah satu anggota petugas dari kelurahan klojen yaitu bapak sukrian. Wawancara ini menekankan terhadap kesetaraan gender dan bagaimana proses yang baik ini dapat terbentuk di lingkungan tersebut. Kemudian dari hal tersebut di paparkanlah penjelasan oleh beliau secara jelas dan lugas yang dapat kami catat sebagai bahan dalam pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu. (Kesetaraan Gender - Teori, Peran dan Keadilan, 2021).

Apabila merujuk pada pandangan normatif yang dimaksudkan kesetaraan gender itu didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandangan yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. (Ismail dkk., 2020)

Indonesia masih memiliki tantangan yang perlu dihadapi dalam hal partisipasi ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta representasi politik perempuan. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Indonesia yang baru saja berganti, sebab jika dilihat dari data Global Gender Gap Report menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2024 masih ada di skor 68,6% dari rata-rata skor kesetaraan gender global yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 68,5%, angka tersebut terpantau 0,01% lebih tinggi dari rata-rata global. Jumlah kenaikan tersebut dapat dijadikan inditator bahwa angka kesadaran masyarakatnya akan kesetaraan gender masih minim. Adapun grafik angka pertahun yang diperoleh Indonesia sebagaimana telah disajikan pada gambar dibawah ini



Gambar 1. Angka Kesadaran Kesetaran Gender 2024, Sumber: Global Gender Gap Report

Adapun bentuk permasalahan bias gender yang masih sering kita jumpai di Indonesia diantaranya yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (violence) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak double burden (Afandi, 2019).

Dalam menggatasi permasalahn tersebut pemerintah terus mendorong untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai program maupun mengeluarkan produk-produk hukum dan melakukan ratifikasi terhadap produk hukum internasional. Salah satu program yang patut untuk terus dikembangkan oleh pemerintah adalah Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. (Pengenalan PUG Kepada Calon Auditor dan Pegawai Lingkup Itjen KLHK, t.t.) Dalam hal ini sektor administrasi terkecil di Indonesia seperti kelurahan memiliki peran yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan yang merujuk pada Pengarusutamaan Gender (PUG) sebab lingkup pemerintahannya memiliki jarak yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dari hasil data wawancara dan observasi yang telah kami dapat dari Kelurahan Klojen dengan narasumber langsung perwakilan dari pihak kelurahan yaitu Bapak Syukrian menyebutkan bahwasannya pihak kelurahan Klojen telah berupaya untuk ikut andil dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah yang merujuk pada Pengarusutamaan Gender yang merujuk pada SDGs 5. Menindaklanjuti

hal tersebut pada kepemimpinan lurah Klojen yang kebetulan juga merupakan seorang perempuan turut menjadi sosok figur yang dapat menjadi teladan bagi warganya khususnya perempuan untuk jangan pernah terpengaruh denan permasalahan bias gender yang terjadi di Indonesia, dengan begitu pihak kelurahan mencanangkan 2 program yang merujuk pada kesetaraan gender dibidang pemerintahan yaitu melalui program pemberdayaan yang bergerak pada bidang perekonomian yang menunjang sebagian besar kehidupan masyarakat Klojen yaitu UMKM dengan cara mengakomodir hasil UMKM tersebut dengan pemberian fasilitas berupa tempat yang dapat digunakan sebagai media promosi sebab letaknya tepat dibagian depan kelurahan. Adapun kebijakan lainnya dibidang kesehatan yang mana kebijakan ini bergerak melalui kegiatan posyandu baik untuk umum maupun penyandang disabilitas

Berikut merupakan hasil dari penerapan 2 kebijakan kelurahan Klojen yang menunjukan perubahan yang patut dijadikan dijadikkan teladan oleh kelurahan-kelurahan lain sebab mampu mewujudkan program yang merujuk pada Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu:

- Peningkatan Kesejahteraan Perempuan melalui program pada bidang kesehatan berupa posyandu disabilitas yang dilaksanakan setiap bulannya di Kelurahan Klojen telah menunjukkan meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai garda terdepan terhadap layanan kesehatan, yang berdampak pada kesejahteraan kesehatan penyandang disabilitas di kelurahan Klojen dan peningkatan partisipasi perempuan pada bidang pemerintahan.
- Peningkatan kapasitas pemimpinan kelurahan yang merupakan seorang perempuan dalam pelatihan kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan di kelurahan klojen juga secara tidak langsung telah memberikan perempuan lainya contoh mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan itu sah-sah saja atau bisa dikata tidak ada perbedaan khususnya gender.

Namun ada beberapa tantangan yang kami temukan dalam pengimplementasi program yang mengarusutamakan kesetaraan gender pada bidang kesehatan dan pemberdayaan di kelurahan Klojen yaitu masih kurangnya sosialisasi program dan minimnya kepedulian masyarakat sekitar kelurahan terhadap segala kegiatan yang diadakan oleh kelurahan ditunjukkan dengan jarangnya warga yang datang ke kelurahan.

Dengan menerapkan strategi yang tepat, kesetaraan gender dalam pemerintahan dapat semakin diwujudkan, sehingga perempuan memiliki peran lebih aktif dalam membangun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan dan inklusivitas masyarakat.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam pemerintahan di Kota Malang ditekankan untuk menciptakan kebijakan inklusif yang adil dan setara. Pemerintah kota telah menunjukkan komitmen dengan memasukkan isu gender dalam proses perencanaan pembangunan. Meskipun sudah ada kebijakan mendukung kesetaraan gender di Indonesia, implementasinya di tingkat lokal terhambat oleh faktor sosial, budaya, akses pendidikan, dan pelatihan kepemimpinan perempuan. Program kesehatan penting dalam kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan nasional. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, keterampilan ekonomi, dan penguatan kapasitas organisasi menjadi langkah strategis. Tindakan konkret termasuk kebijakan akses pendidikan yang sama dan perlindungan terhadap korban kekerasan gender telah diambil. Program kesetaraan gender di Kelurahan Klojen, termasuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan kapasitas pemimpin perempuan, telah membawa dampak positif. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi program dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kelurahan. Dengan strategi yang tepat, kesetaraan gender dalam pemerintahan dapat diperkuat untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam kebijakan yang inklusif.

REFERENSI

1. Afandi, A. (2019). BENTUK-BENTUK PERILAKU BIAS GENDER. *Lentera : Journal of Gender and Children Studies*, *1*(1). https://doi.org/10.26740/lentera.v1i1.6819
2. Agustina, S., Wurdiyantho, R., Siregar, T. F., Yohanes, R., Tambunan, R., & Siregar, Y. S. (2023). *Tantangan Regulasi Hukum Investasi di Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. *7*.
3. Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NORMATIF DAN SOSIOLOGIS. *SASI*, *26*(2), 154. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224
4. *Kesetaraan Gender—Teori, Peran dan Keadilan*. (2021, September 15). https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html
5. *Pengenalan PUG Kepada Calon Auditor dan Pegawai Lingkup Itjen KLHK*. (t.t.). Itjen KLHK. Diambil 26 Mei 2025, dari https://itjen.menlhk.go.id/berita/pengenalan-pug-kepada-calon-auditor-dan-pegawai-lingkup-itjen-klhk
6. Ul'zikri, A. R., & Annisa, S. N. (2024). Demokrasi Di Tempat Kerja : Analisis Diskursus Melalui Pendekatan Classroom Action Research. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *11*(02), 764–776. https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17525
7. Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994